



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AFRIZAL**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **435560**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1933 m2/120 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/200 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 2497 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2976 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 2911 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 4296 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 445.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX 150 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI STRADA CR 2,5 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	400.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.184.146.404
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.829.146.404
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.829.146.404

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.